

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Nasional adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu Negara. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan Negara tersebut semakin maju dan berkembang. Konteks pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang masuk dalam teori makro ekonomi. Tinggi rendah angka pembangunan dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Pertumbuhan ekonomi meliputi segenap aktivitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dan menentukan angka pendapatan nasional suatu Negara serta kesejahteraan masyarakatnya. Priambodo, A. (2014)

Syafrizal (2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Mengingat potensi masing- masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing- masing daerah harus menentukan kegiatan sector dominan (unggulan).

Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tidak terlepas dari peranan masing- masing sektor yang ada. Semakin besar kontribusi masing- masing sektor maka semakin cepat pertumbuhan yang ada.

**Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 – 2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam persen)**

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota (dalam persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata- rata
Kerinci	4,93	4,23	3,86	4,16	4,43	4,32
Merangin	5,39	4,93	0,83	5,09	5,72	4,5
Sarolangun	4,68	4,80	-0,25	6,61	6,73	4,51
Batanghari	4,81	4,83	-0,39	4,74	12,27	5,25
Muaro Jambi	4,95	5,01	0,37	4,08	7,97	4,47
Tanjung Jabung Timur	3,07	2,94	-3,92	0,13	0,57	0,56
Tanjung Jabung Barat	4,48	6,77	-0,6	1,36	2,56	2,91
Tebo	5,58	4,98	0,02	4,32	6,3	4,24
Bungo	5,68	4,65	0,44	5,12	4,73	4,11
Kota Jambi	4,68	5,30	-3,96	3,94	5,36	3,06
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	-0,16	3,67	4,45	3,77
Provinsi Jambi	7,85	7,51	7,97	8,09	7,62	7,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2023

Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan secara berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Timur yang mengalami peningkatan secara bervariasi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata- rata periode 2018-2022 sebesar 0,56 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi diperiode yang sama terjadi di Provinsi Jambi dengan rata- rata sebesar 7.81 persen.

Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang paling rendah akan berdampak pada lemahnya peningkatan pendapatan masyarakat. Maka dari itu perlu upaya memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan tumbuh kembangnya perekonomian diwilayah bersangkutan untuk meminimalisir ketimpangan antar daerah serta mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal (Andirfa, 2009) Pertumbuhan ekonomi ditanjung jabung timur yang masih rendah dikarenakan masih banyaknya penduduk yang bekerja dibidang pertanian. Maka dari itu perlu upaya memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan tumbuh kembangnya perekonomian diwilayah bersangkutan untuk meminimalisir ketimpangan antar daerah. Serta mencapai kualitas pelayanan public yang maksimal (Andirfa, 2009).

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber- sumber dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Karena kemampuan perencanaan dan penngawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran- kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Perananan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah. yaitu kurang dari 20 persen hingga 50 persen. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan belanja modal kurang dari 20 persen.

Pendapatan Asli Dearah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan

meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2006). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda- beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industry dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar disbanding daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. disatu sisi ada daerah yang tertinggal Karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Namun sangat tergantung pembiayaannya melalui dana alioikasi umum yang diberikan pemerintah pusat.

Kecilnya PAD di kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pendapatan daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten tersebut belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya. Namun pada realita menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat. Dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya.

Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah. namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah Simanjuntak, S. (2004) mengenai proporsi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jambi tahun 2018-2022, peningkatan PAD Sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi PAD, DAU , DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jambi kecendrungan masih rendah.

**Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	80,48	85,90	81,67	66,89	36,71
2	Merangin	89,30	106,16	100,32	107,88	105,43
3	Sarolangun	118,83	94,62	70,10	63,59	62,62
4	Batanghari	98,81	91,57	104,23	148,44	107,14
5	Muaro Jambi	90,31	93,79	92,80	110,75	108,27
6	Tanjung Jabung Timur	49,61	53,92	49,65	81,60	52,84
7	Tanjung Jabung Barat	101,84	120,22	115,56	118,53	130,48
8	Tebo	76,16	83,24	78,46	92,92	79,14
9	Bungo	133,85	140,33	126,13	198,75	130,12
10	Kota Jambi	338,89	393,43	355,67	384,73	436,89
11	Kota Sungai Penuh	34,18	34,90	29,05	59,11	66,15

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kondisi ini akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk makin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. Pemberian Otonomi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan- kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Berdasarkan table 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 PAD Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi PAD tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 436,89 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2018 di Kota Sungai Penuh sebesar 34,18 M.

**Tabel 1.3. Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)**

Wilayah	DAU					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	589,20	613,63	567,86	557,77	557,77	577,24
Merangin	718,85	742,33	666,86	658,73	658,89	689,13
Sarolangun	529,50	600,49	536,90	529,16	529,50	545,11
Batanghari	605,74	632,05	569,63	559,82	560,13	585,47
Muaro Jambi	670,34	700,82	629,16	619,50	620,13	647,99
Tanjung Jabung Timur	540,40	565,64	521,92	514,77	514,99	531,54
Tanjung Jabung Barat	506,59	537,18	487,55	479,38	479,79	498,09
Tebo	582,31	599,22	534,45	528,39	528,68	542,41
Bungo	636,00	657,96	600,09	589,40	589,40	614,57
Kota Jambi	714,78	759,71	687,48	675,29	675,29	702,51
Kota Sungai Penuh	422,53	452,46	412,57	405,07	405,07	419,54

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAU Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAU tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 759,71 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 405,07 M.

**Tabel 1.4. Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)**

Wilayah	DAK					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	54,00	77,52	48,91	67,87	41,05	57,87
Merangin	83,87	118,77	111,06	98,62	49,74	92,412
Sarolangun	75,56	126,79	82,42	75,00	75,56	87,06
Batanghari	50,44	73,44	85,20	111,89	95,09	83,21
Muaro Jambi	61,59	67,91	52,78	79,63	71,19	66,62
Tanjung Jabung Timur	114,87	101,11	81,05	109,10	114,06	104,03
Tanjung Jabung Barat	55,79	80,32	87,65	72,43	67,39	72,71
Tebo	43,12	71,86	54,71	109,64	119,66	79,69
Bungo	98,66	106,31	84,98	49,13	51,01	78,01
Kota Jambi	148,63	105,45	125,21	103,11	52,52	87,84
Kota Sungai Penuh	44,06	58,84	49,13	42,86	39,46	46,87

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAK Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAK tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 148,63 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 39.46 Milyar.

**Tabel 1.5. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)**

Wilayah	Belanja Modal					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	191,87	293,81	216,76	165,03	158,55	205,20
Merangin	207,24	226,73	274,68	342,89	73,71	175,65
Sarolangun	215,17	414,97	247,73	158,70	184,69	244,25
Batanghari	148,21	251,15	150,46	177,30	276,39	200,70
Muaro Jambi	292,73	322,19	262,78	268,24	246,15	278,41
Tanjung Jabung Timur	312,96	328,87	229,23	229,95	290,56	278,31
Tanjung Jabung Barat	419,66	697,23	353,97	404,37	474,29	469,90
Tebo	258,99	269,09	139,86	222,21	387,53	255,53
Bungo	203,21	234,63	153,99	103,30	115,34	162,09
Kota Jambi	445,81	432,10	444,35	495,81	368,63	437,34
Kota Sungai Penuh	194,68	176,54	134,64	168,82	140,13	162,96

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 1.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 Belanja Modal Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi Belanja Modal tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 495,81 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2022 di Kabupaten Merangin sebesar 73,71 Milyar.

Peningkatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal menunjukkan pemerintah daerah belum dapat menjalani otonomi daerah sepenuhnya dan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Bila dibandingkan dengan PAD yang walaupun mengalami peningkatan sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada Dana Alokasi oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota sebagai dana bantuan (grant). Tingginya tingkat ketergantungan belanja modal terhadap pendanaan dana



alokasi umum,itu menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Optimalnya dan alokasi umum yang diperoleh daerah dialokasikan untuk belanja modal yang kemudian akan meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah. Realita menunjukkan hal yang sebaliknya. Daerah cenderung mengabaikan penggalian sumber- sumber PAD sebagai basis utama penerimaan daerah menjadikan dana perimbangan berupa dana alokasi umum sebagai substitusinya (Maimunah, 2015)

Penyebab permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan yang timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Disisi lain Alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bias dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah. dan system penganggaran yang belum berdasarkan pada analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU, DAK bahkan Belanja Modal daripada mengupayakan peningkatan penerimaan asli daerah (PAD). Hal ini

memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis upaya ini lebih dipilih dari pada meningkatkan PAD secara signifikan. Sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengalokasikan dana ke berbagai bentuk pengeluaran pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Beranjak dari permasalahan diatas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pola perubahan alokasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi Jambi sebagai objek penelitian yang berjudul “ Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. pemberian otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan kehidupan berdemokrasi keadilan. Pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena ekonomi menjadi pilar utama pembangunan social. Melalui alokasi belanja sector ekonomi secara langsung akan mendorong pembangunan social. Alokasi belanja merupakan salah satu cara fundamental daerah otonom untuk meningkatkan potensi pembangunan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan kemandirian. Pembangunan wilayah meliputi berbagai aspek diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dan penyediaan infrastruktur social maupun ekonomi. Dengan platform alokasi belanja yang efektif dan efisien. Diproyeksikan pelaksanaan desentralisasi fiskal akan terwujud. Sinkronisasi antara alokasi belanja terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita regional tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah. Alokasi belanja pemerintah berupa belanja modal merupakan salah satu bentuk investasi public yang mendorong tumbuhnya nilai tambah (value added) barang dan jasa. Sehingga dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah berupa PAD dan DAU serta akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

Berdasarkan permasalahan diatas dan uraian telaah penelitian terdahulu masih terdapat “research gap” antara hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022.
2. Bagaimana Pengaruh PAD, DAU dan DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, penelitian yang penulis lakukan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.
2. Menganalisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan informasi bagi peneliti lainnya yang ingin mencoba meneliti dan mempelajari lebih lanjut yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Secara Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dan benar khususnya masalah Penerimaan dan Pengeluaran PAD, DAU,DAK, Belanja Modal serta Pertumbuhan Ekonomi.